

Persepsi Publik, Kapasitas Personal dan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam Mengatasi Pandemi Covid-19

Nyarwi Ahmad

Universitas Gadjah Mada

Alamat : Jl. Sosio Yustisia No.1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia

Email : nyarwiahmad@ugm.ac.id

Public Perceptions, Joko Widodo's Personal Competence and Leadership in Handling Covid-19 Pandemi

Abstract

This article is directed to examine how did Indonesian people perceived Joko Widodo's personal competence and leadership resiliency during the covid-19 pandemic era and the degree to which did political preference of these people on political party carry out effects on such perceptions. Focusing on these issues, this article adopts concepts of presidential leadership, personal competence, resilient leadership and political preference, collects the survei data derived from 1200 respondents using a multistage random sampling and extracts the survei data using descriptive and cross tabulation statistical analyses. The finding indicates that the Indonesian people's perception of Joko Widodo's personal competence and leadership resiliency to handle covid-19 pandemic-related problems varied. Most of them perceived that President Joko Widodo had personal competence and leadership resiliency to manage covid-19 pandemic. Polical preference of these people on political party are likely to determine these perceptions however. These evidences confirms that not merely a perception bias among these people regarding Joko Widodo's personal competence and leadership resiliency to manage covid-19 pandemic-related problems keep evolving, but also political preference of these people on political party have been taking place as a determinant factor. This hints that a perception bias remained taking shape as influential factor that determines the development of Indonesian (electoral) politics.

Key Words: *public' perception; presidential leadership; covid-19 pandemic; Joko Widodo; political preference.*

Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk membahas bagaimana masyarakat di Indonesia mempersepsikan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 dan juga sejauh mana preferensi politik mereka pada parpol berdampak pada persepsi mereka mengenai hal tersebut. Dengan fokus pada kedua hal tersebut, penulis, dalam artikel ini, mengadaptasi konsep kepemimpinan presiden, kapasitas personal, ketangguhan kepemimpinan dan preferensi politik sebagai kerangka konsep dan melakukan survei nasional di 34 Propinsi pada bulan April 2021. Data survei dikumpulkan dari 1200 responden yang dipilih dengan metode multistage random. Data survei tersebut dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi publik terkait dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 cukup beragam. Namun mayoritas publik berpandangan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 tersebut. Pilihan politik terhadap parpol dalam Pemilu Legislatif 2019 menentukan persepsi tersebut. Temuan tersebut mengindikasikan adanya bias persepsi publik terkait dengan kemampuan personal dan resiliensi kepemimpinan seorang presiden dalam penanganan bencana, seperti wabah pandemi dan bias persepsi tersebut ditentukan oleh preferensi politik publik terhadap partai politik. Hal ini mengindikasikan bahwa bias persepsi publik masih menjadi faktor yang berpengaruh yang dapat menentukan perkembangan politik electoral di Indonesia.

Kata kunci: Persepsi publik; kepemimpinan presiden; pandemi covid 19; Joko Widodo; preferensi politik.

LATAR BELAKANG

Di sebuah negara demokrasi, khususnya yang menganut sistem presidensial, seperti Indonesia, sosok presiden memiliki posisi dan peran yang sangat penting. Presiden menduduki posisi tidak hanya sebagai kepala Negara, namun juga sebagai kepala Pem

Presiden di masa pandemi. Lebih spesifik lagi, artikel ini hendak mengeksplorasi dua hal berikut. Pertama, seperti apa publik atau masyarakat di Indonesia mempersepsikan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah pandemi covid 19. Kedua, sejauh mana preferensi politik mer erintahan (Ahmad, 2017, 2021a). Sosok presiden tidak hanya sekedar memiliki kekuasaan yang sangat besar baik dalam kapasitas dirinya sebagai kepala Negara maupun kepala Pemerintahan. Lebih dari itu presiden juga merupakan figure utama yang menjadi pusat perhatian publik (Ahmad, 2020) and dalam panggung komunikasi publik di negara semacam itu (Ahmad, 2021b). Harapan publik pada kapasitas personal dan ketangguhan presiden dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh publik juga sangat besar, tidak hanya dalam situasi yang normal saja, namun juga di masa krisis ekonomi, sosial dan kesehatan, seperti yang diakibatkan oleh wabah masa pandemi saat ini.

Artikel ini hendak mengkaji seperti apa publik di Indonesia mempersepsikan kemampuan personal dan resiliensi atau ketangguhan kepemimpinan eka pada partai politik dalam Pemilu Legislatif 2019 lalu dapat menjadi faktor potensial yang bisa menentukan persepsi mereka terkait dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan persoalan publik yang diakibatkan oleh wabah pandemi covid tersebut.

Mengapa kajian yang secara khusus membahas persepsi publik di Indonesia terkait dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan seorang presiden dalam mengatasi wabah covid 19 perlu dilakukan? Alasannya adalah sebagai berikut. Selama lebih dari lima dasawarsa terakhir, kajian yang terkait dengan presiden dan kepresidenan berkembang sangat pesat (Bowles, 1999; Moe, 2009). Kajian-kajian tersebut pada umumnya dilakukan dengan fokus pada transisi kekuasaan presiden (King & Riddlesperger, Jr 1995; Tenpas & Dickinson, 1997) dan dimensi, perkembangan dan dinamika kekuasaan presiden (Neustadt, 1960, 1976). Eshbaugh-Soha & Peake, 2004; Canes-Wrone, Howell & Lewis, 2008). Sejumlah kajian juga dilakukan untuk mengevaluasi pidato-pidato presiden dan proses pembuatan pidato presiden (Eshbaugh-Soha, 2010; Eshbaugh-Soha & Miles, 2011), retorika presiden (Hickel Jr, 2019), kemampuan presiden dalam menentukan agenda-setting (Olds, 2013) dan impeachment president (Fried & Cole, 2004). Kajian mengenai retorika presiden, termasuk dalam konteks Indonesia, dalam menangani covid-19 pernah dilakukan di Indonesia (Ahmad, 2021a). Meski sosok presiden dan beragam jenis aktivitas komunikasi yang dilakukannya sangat potensial menjadi topik penelitian tesis dan disertasi bidang ilmu komunikasi, sosial dan humaniora di Indonesia (Ahmad, 2022a), riset-riset yang terkait dengan kapasitas personal dan ketangguhan presiden dalam mengatasi beragam jenis bencana alam dan non-alam dan juga persepsi publik terkait dengan hal tersebut masih belum sepenuhnya berkembang dengan maksimal.

Secara umum, sudah banyak peneliti yang melakukan beragam kajian terkait dengan kinerja dan retorika para presiden di negara-negara demokrasi, khususnya yang menganut sistem presidensial. Namun dari kajian yang mereka lakukan pada umumnya dilakukan dalam konteks politik Amerika Serikat. Kajian-kajian tersebut mereka lakukan antara lain untuk mengkaji akuntabilitas kinerja presiden (Morris, 1986; Rockhman, 1986), performance kinerja presiden (Shaw, 1998; Gilbert, 2006) dan model-model kepemimpinan presiden (Burnam, 2010). Beberapa peneliti lainnya juga meneliti model kepemimpinan dan gaya retorika presiden (Windt Jr, 1986; Teten, 2007), proses inisiasi dan pembuatan kebijakan publik presiden (Ponder, 1996; Steger, 1997) dan tingkat dukungan publik dan elit terhadap presiden (Edwards III, 1997; Lebo, 2008; Cohen, 2013). Meski demikian, tidak banyak kajian yang secara khusus dilakukan untuk mengkaji seperti persepsi publik terkait dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden dalam menghadapi wabah global, khususnya pandemi covid 19 dan sejauh mana preferensi politik publik pada partai politik ikut menentukan persepsi mereka terkait dengan hal tersebut.

Penulis berpendapat bahwa sebuah kajian yang secara khusus membahas kedua hal di atas perlu dilakukan. Alasannya adalah sebagai berikut. Sejak awal tahun 2020, wabah covid 19 terus meluas di berbagai belahan dunia. Jumlah korban yang terinfeksi hingga yang meninggal juga masih bertambah. Dalam merespons perkembangan tersebut, mereka yang menjadi kepala Negara dan tau Pemerintahan, termasuk Presiden, pada umumnya mengembangkan dua jenis kebijakan publik dan mengembangkan model kepemimpinan dalam pemerintahannya dengan melakukan program penguatan kesehatan publik untuk menghalau laju skala penyebaran wabah tersebut ke berbagai wilayah dan program-program insentif pemulihan ekonomi nasional dan pemberdayaan masyarakat.

Trend tersebut di atas juga terjadi di Indonesia sejak wabah covid 19 berkembang di negeri ini. Setiap bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, sejak era pembatasan social berskala besar (PSBB) hingga era New Normal, selalu menuai perdebatan publik, baik di media massa dan media social. Selama beberapa bulan terakhir, Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menjalankan kebijakan New Normal. Ada sejumlah harapan, optimisme dan juga kritis yang muncul dari sejumlah kalangan dalam menilai kemampuan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam merumuskan dan mengimplementasikan tersebut. Pandangan tersebut tidak hanya bersumber dari elit politik, namun juga dari publik.

Indonesia tidak hanya menganut sistem presidensial, yang mana presiden memiliki posisi dan kekuasaan sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Indonesia juga menganut sistem multi partai, dimana sejumlah partai politik memiliki peran penting (Ahmad, 2017), tidak hanya dalam proses seleksi dan pencalonan pasang calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres saja (2022b). Namun partai politik juga memiliki peran penting sebagai institusi politik yang dapat menjadi mitra presiden dalam menjalankan kekuasaan Pemerintahan maupun mengevaluasi kinerja presiden melalui wakil-wakil mereka di DPR/parlemen (Ahmad, 2022c). Dalam konteks ini, penulis berasumsi bahwa bukan tidak mungkin publik yang memiliki keyakinan dan pandangan positif atas kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden tersebut sejalan dengan dukungan politik publik pada partai politik. Namun bukan tidak mungkin juga, yang terjadi juga sebaliknya. Di tengah perkembangan tersebut, kita masih memiliki pengetahuan yang sangat terbatas terkait dengan hal tersebut.

Berkaitan dengan kondisi ini, penulis, melalui artikel ini, hendak mengkaji dua pertanyaan berikut. *Pertama*, seperti apa persepsi publik atas kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 tersebut sejak penerapan kebijakan New Normal? *Kedua*, sejauh mana preferensi politik pada partai politik dalam Pemilu Legislatif 2019 lalu masih menjadi salah satu faktor yang potensial yang menentukan persepsi publik atas kemampuan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 tersebut?

Untuk menjawab dua pertanyaan di atas, penulis mengadaptasi konsep-konsep berikut. *Pertama*, konsep-konsep yang terkait dengan kepemimpinan presiden. Beberapa konsep yang menjadi referensi di sini diambil dari pemikiran Neustadt (1960, 1976), Thomas (1977), Tenpas dan Dickinson (1997) dan Bowles (1999) terkait dengan kemampuan dan model kepemimpinan presiden dalam mengelola kekuasaan di Pemerintahan. *Kedua*, konsep-konsep yang terkait dengan kapasitas personal (*personal competence*) dari seorang pemimpin, khususnya presiden. Beberapa konsep yang akan diadaptasi di sini antara lain dari pemikiran Richard Bold dan Jonathan Gosling (2006), Sateesh V. Shet, S.V Patil dan Meena R. Chandawarkar, (2017) dan Davidson et al (2012). *Ketiga*, konsep-konsep yang terkait dengan ketangguhan kepemimpinan (*resilience leadership*) yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, khususnya presiden. Beberapa konsep yang akan digunakan di sini antara lain dari pemikiran Kawasi Dartey-Baah (2015) dan Ledesma (2014). *Keempat*, kerangka konsep yang terkait dengan preferensi politik yang dikemukakan oleh Johnson (1964), Folke dan Rickne (2020) dan Muller dan Renes (2021).

Dengan berbasis pada konsep-konsep di atas, penulis hendak mengevaluasi persepsi publik atas kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19. Untuk tujuan tersebut, penulis mengevaluasi dua belas hal berikut. *Pertama*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mendeteksi dan mengantisipasi ancaman bahaya persebaran virus Covid-19 sejak wabah ini muncul di Indonesia. *Kedua*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam memberikan penjelasan kepada publik tentang peristiwa dan data yang menggambarkan bahaya Covid-19. *Ketiga*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan publik yang terkait dengan agenda pemulihan ekonomi nasional sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. *Keempat*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan publik yang terkait dengan penanganan krisis kesehatan publik/masyarakat sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. *Kelima*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mengevaluasi kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan agenda pemulihan ekonomi nasional sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. *Keenam*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mengevaluasi kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan penanganan krisis kesehatan publik/masyarakat sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. *Ketujuh*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menyempurnakan kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan agenda pemulihan ekonomi nasional sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. *Kedelapan*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menyempurnakan kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan penanganan krisis kesehatan publik/masyarakat sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. *Kesembilan*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya internal yang dimiliki oleh Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk membangkitkan kembali perekonomian/tingkat pendapatan/tingkat daya beli masyarakat di tengah wabah Covid-19. *Kesepuluh*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya eksternal di luar Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk membangkitkan kembali perekonomian/tingkat pendapatan/tingkat daya beli masyarakat di

tengah wabah Covid-19. *Kesebelas*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya internal yang dimiliki oleh Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk memperkuat kembali tingkat kesehatan publik/masyarakat di tengah wabah Covid-19. *Keduabelas*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya eksternal di luar Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk memperkuat kembali tingkat kesehatan publik/masyarakat di tengah wabah Covid-19. Selain keduabelas hal di atas, preferensi publik pada partai politik yang dipilihnya dalam Pemilu Legislatif 2019 juga dievaluasi.

Dua belas hal tersebut di atas kemudian dijadikan sebagai indikator-indikator untuk menyusun kuesioner yang digunakan dalam survei nasional di 34 propinsi di Indonesia. Data survei yang terkumpul kemudian digunakan untuk mengevaluasi dua proposisi berikut. *Pertama*, persepsi publik atas kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan untuk menangani penanggulangan wabah covid 19 cukup beragam. Kemampuan ini tidak hanya terkait dengan model perumusan dan jenis-jenis bidang kebijakan yang harus dijalankannya maupun prioritas program yang hendak dijalankannya semata. Kemampuan ini juga terkait dengan sejauh mana Presiden dipandang mampu oleh publik dalam merumuskan, mengevaluasi, mereformulasi dan menjalankan kebijakan publik untuk penanganan wabah covid tersebut. *Kedua*, persepsi publik atas kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden tersebut tidak hanya bersifat dinamis, namun juga ditentukan oleh beragam faktor. Salah satu faktor yang potensial ikut menentukan persepsi publik tersebut adalah preferensi politik publik terhadap partai politik yang dipilihnya dalam pemilu legislative 2019 lalu.

METODE

Untuk mengevaluasi dua proposisi di atas, penulis mengadaptasi pendekatan positivist dan menggunakan metode penelitian survei. Survei nasional dilakukan pada Bulan April 2021 di seluruh Indonesia meliputi 34 Provinsi, yaitu: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kaltara, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Sulut, Sulbar, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Dalam metode survei tersebut, teknik penarikan sample dilakukan dengan menerapkan prinsip *probabilitas*. Dalam hal ini, pemilihan sampel dilakukan dengan metode yang biasa disebut teknik sampling probabilitas yang memungkinkan setiap anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih atau tak dipilih jadi responden. Dengan prinsip ini, pengukuran pendapat publik dapat dilakukan dengan hanya melibatkan sedikit orang. Meski tanpa melibatkan semua anggota populasi, hasil survei/polling dapat digeneralisasikan sebagai representasi suara mayoritas.

Metode pengumpulan data survei yang digunakan adalah dengan wawancara tatap muka langsung. Tim pewawancara diseleksi dan di training oleh sebuah pusat kajian yang penulis dirikan dan pimpin sejak awal tahun 2020 lalu, yaitu *Indonesian Presidential Studies* (IPS). Tim pewawancara mendatangi kediaman calon responden untuk melakukan wawancara tatap muka secara langsung. Semua target responden yang diseleksi dipilih dengan menggunakan tehnik *multistage stratified random* dengan populasi adalah penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas berdasarkan data Sensus Nasional 2020. Dalam survei nasional tersebut, tingkat *margin of error* yang digunakan adalah +/- 2.9 % dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Berdasarkan hal ini, jumlah sample yang digunakan adalah 1200 sample.

Dalam menjalankan *multistage random sampling* tersebut, dua komponen utama dalam menghitung *margin of error* menjadi bahan pertimbangan penting, yaitu stratifikasi populasi, dan cluster populasi. Dua hal tersebut digunakan sebagai estimasi untuk mendapatkan jumlah sampel yang menjadi target penelitian, yaitu sebesar 1200 responden. Proses wawancara tatap muka dengan responden tersebut dilakukan oleh anggota tim pewawancara telah dilatih oleh koordinator wilayah penelitian yang berasosiasi dengan *Indonesian Presidential Studies* (IPS). Untuk menjaga kualitas data, *spotcheck* sebanyak 20% dari seluruh responden juga dilakukan dalam proses pengumpulan data survei dari 1200 responden tersebut.

Hasil pengumpulan data survei dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan di atas kemudian diinput ke dalam program SPSS 23 dan diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan cross tabulasi. Hasil penelitian berdasarkan olahan data survei tersebut dapat disimak pada sub bahasan hasil dan diskusi.

HASIL DAN DISKUSI

Persepsi Publik Terhadap Kapasitas Personal Kepemimpinan Joko Widodo

Seperti apa persepsi publik atas kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan untuk menangani penanggulangan wabah pandemi covid-19? Untuk menjawab pertanyaan ini, evaluasi berdasarkan data survei dilakukan melalui dua belas hal berikut. *Pertama*, persepsi publik terkait kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mendeteksi dan mengantisipasi ancaman bahaya persebaran virus Covid-19 sejak wabah ini muncul di Indonesia. Hasil analisis deskriptif statistik dari data survei menunjukkan bahwa 48,5 % dari publik menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Hanya sebagian kecil diantara mereka yang menilai Presiden Joko Widodo tidak mampu/sangat tidak mampu melakukan hal tersebut (13,5%) dan 33,3 % diantara mereka yang menilai kemampuannya dalam melakukan hal tersebut biasa saja. Sisanya menyatakan tidak tahu dan tidak memberikan jawaban.

Kedua, persepsi publik terkait kemampuan Presiden Joko Widodo dalam memberikan penjelasan kepada publik tentang peristiwa dan data yang menggambarkan bahaya Covid-19. Hasil analisis deskriptif statistik dari data survei menunjukkan bahwa mayoritas publik menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut (50,9 %). Hanya sebagian kecil sekali dari responden yang menganggapnya tidak mampu/sangat tidak mampu dalam melakukan hal tersebut (8,3 %). Sedangkan yang menganggap kemampuan Presiden Joko Widodo dalam melakukan hal tersebut adalah biasa saja sebesar 35,6 % dari mereka. Sisanya menyatakan tidak tahu dan tidak memberikan jawaban.

Ketiga, persepsi publik terkait kemampuan Presiden Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan publik yang terkait dengan agenda pemulihan ekonomi nasional sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. Hasil analisis deskriptif statistik dari data survei menunjukkan bahwa 43,6 % dari publik menyatakan Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan dalam melakukan hal tersebut. Hanya 14,1 % dari mereka yang menyatakan dia tidak memiliki kemampuan dalam melakukan hal tersebut dan 35,2 % dari mereka yang menyatakan kemampuannya dalam melakukan hal tersebut adalah biasa saja. Sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu dan tidak memberikan jawaban.

Keempat, persepsi publik terkait kemampuan Presiden Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan publik yang terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan publik/masyarakat sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. Hasil analisis deskriptif statistik dari data survei menunjukkan bahwa 47,8 % dari publik menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Sedangkan yang menilai kemampuannya untuk melakukan hal tersebut adalah biasa saja sebesar 34 %. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan tersebut (11,6 %). Sedangkan selebihnya menjawab tidak tahu dan tidak memberikan jawaban.

Kelima, persepsi publik terkait kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mengevaluasi kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan agenda pemulihan ekonomi nasional sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. Hasil analisis deskriptif statistik dari data survei menunjukkan bahwa 42,1 % dari publik menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan tersebut (13,8 %). Sementara itu, mereka yang menilai kemampuannya untuk melakukan hal tersebut adalah biasa saja sebesar 37,1 %. Selebihnya menjawab tidak tahu dan tidak memberikan jawaban.

Keenam, persepsi publik terkait kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mengevaluasi kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan publik/masyarakat sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. Hasil analisis deskriptif statistik dari data survei menunjukkan bahwa 44,5 % dari publik menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Sedangkan yang menilai kemampuannya untuk melakukan hal tersebut adalah biasa saja sebesar 36,7 %. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan tersebut (11,3 %). Selebihnya menjawab tidak tahu dan tidak memberikan jawaban.

Ketujuh, persepsi publik terkait kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menyempurnakan kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan agenda pemulihan ekonomi nasional sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. Hasil analisis deskriptif statistik dari data survei menunjukkan bahwa 42,4 % dari publik menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan tersebut (13,3 %). Sementara itu, mereka yang menilai kemampuannya untuk melakukan hal tersebut adalah biasa saja sebesar 36,3 %. Selebihnya menjawab tidak tahu dan tidak memberikan jawaban.

Kedelapan, persepsi publik terkait kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menyempurnakan kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan publik/masyarakat sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. Hasil analisis deskriptif statistik dari data survei menunjukkan bahwa 44,3 % dari publik menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Sedangkan yang menilai kemampuannya untuk melakukan hal tersebut adalah biasa saja sebesar 37,5 %. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan tersebut (10,1 %). Selebihnya menjawab tidak tahu dan tidak memberikan jawaban.

Kesembilan, persepsi publik terkait kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya internal yang dimiliki oleh Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk membangkitkan kembali perekonomian/tingkat pendapatan/tingkat daya beli masyarakat di tengah wabah Covid-19. Hasil analisis deskriptif statistik dari data survei menunjukkan bahwa 43,2 % dari publik menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan tersebut (9,6 %). Sementara itu, mereka yang menilai kemampuannya untuk melakukan hal tersebut adalah biasa saja sebesar 35,8 %. Selebihnya menjawab tidak tahu dan tidak memberikan jawaban.

Kesepuluh, persepsi publik terkait kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya eksternal di luar Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk membangkitkan kembali perekonomian/tingkat pendapatan/tingkat daya beli masyarakat di tengah wabah Covid-19. Hasil analisis deskriptif statistik dari data survei menunjukkan bahwa 40,6 % dari publik menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Sedangkan yang menilai kemampuannya untuk melakukan hal tersebut adalah biasa saja sebesar 36,8 %. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan tersebut (9,9 %). Selebihnya menjawab tidak tahu dan tidak memberikan jawaban.

Kesebelas, persepsi publik terkait kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya internal yang dimiliki oleh Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk memperkuat kembali tingkat kesehatan publik/masyarakat di tengah wabah Covid-19. Hasil analisis deskriptif statistik dari data survei menunjukkan bahwa 43,6 % dari publik menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan tersebut (8,2 %). Sementara itu, mereka yang menilai kemampuannya untuk melakukan hal tersebut adalah biasa saja sebesar 36,7 %. Selebihnya menjawab tidak tahu dan tidak memberikan jawaban.

Keduabelas, persepsi publik terkait kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya eksternal di luar Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk memperkuat kembali tingkat kesehatan publik/masyarakat di tengah wabah Covid-19. Hasil analisis deskriptif statistik dari data survei menunjukkan bahwa 43,4 % dari publik menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Sedangkan yang menilai kemampuannya untuk melakukan hal tersebut adalah biasa saja sebesar 34,2 %. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan tersebut (10 %). Selebihnya menjawab tidak tahu dan tidak memberikan jawaban.

Hasil temuan di atas secara umum menunjukkan bahwa persepsi publik terkait dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 sejak penerapan kebijakan New Normal tampak cukup beragam. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian publik menyatakan puas/sangat puas dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 sejak penerapan kebijakan New Normal. Sebagian menjawab biasa saja, dan hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak puas/sangat tidak puas dan tidak memberikan jawaban/mengaku tidak tahu. Kendati demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa mayoritas publik menyatakan bahwa mereka mengaku puas/sangat puas dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 sejak penerapan kebijakan New Normal.

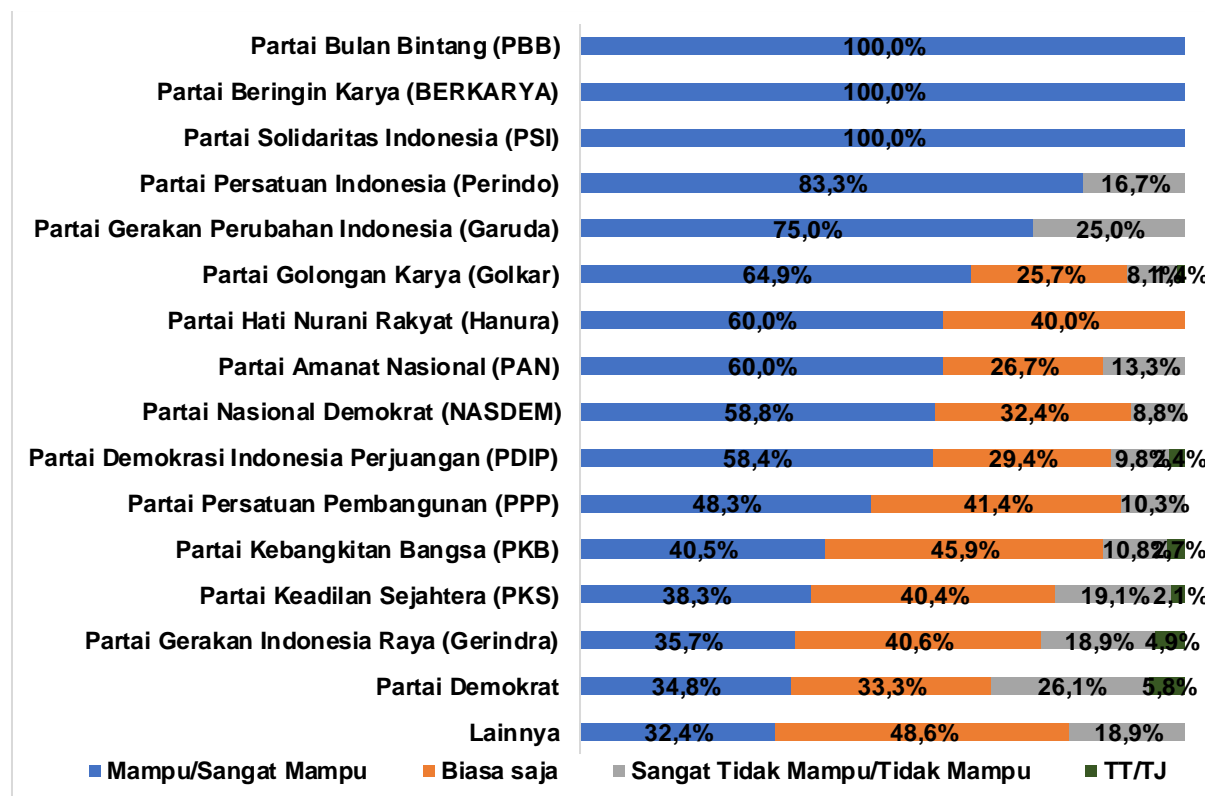
Bias Persepsi Publik: Preferensi Politik Pada Parpol dalam Pemilu Legislatif 2019 Sebagai Faktor Penentu

Dari temuan data survei yang ada, pilihan publik pada parpol-parpol dalam Pemilu Legislatif 2019 secara umum menjadi salah satu faktor potensial yang mempengaruhi persepsi publik atas kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 sejak penerapan kebijakan New Normal. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam bagan 1-12 berikut, faktor ini menjadi faktor potensial yang dapat menentukan persepsi publik mengenai kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo tersebut.

Sebagaimana yang sudah disinggung di atas, kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo ini dievaluasi berdasarkan dua belas hal berikut. *Pertama*, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mendeteksi dan mengantisipasi ancaman bahaya persebaran virus Covid-19 sejak wabah ini muncul di Indonesia. Hasil analisis statistik cross tabulasi menunjukkan mayoritas pemilih PDIP, Partai Nasdem,

PAN, Partai Hanura, Golkar, Partai Garuda dan Partai Perindo menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan terkait dengan hal tersebut. Bahkan mereka yang mengaku sebagai pemilih PSI, Partai Berkarya dan PBB semuanya menilai dia memiliki kemampuan semacam itu. Hanya 26,1 % pemilih Partai democrat, 25 % pemilih Partai Garuda, 19,1% pemilih PKS dan 18,9 % pemilih Partai Gerindra yang menilai dia tidak memiliki kemampuan semacam itu. Lebih lanjut terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam bagan 1.

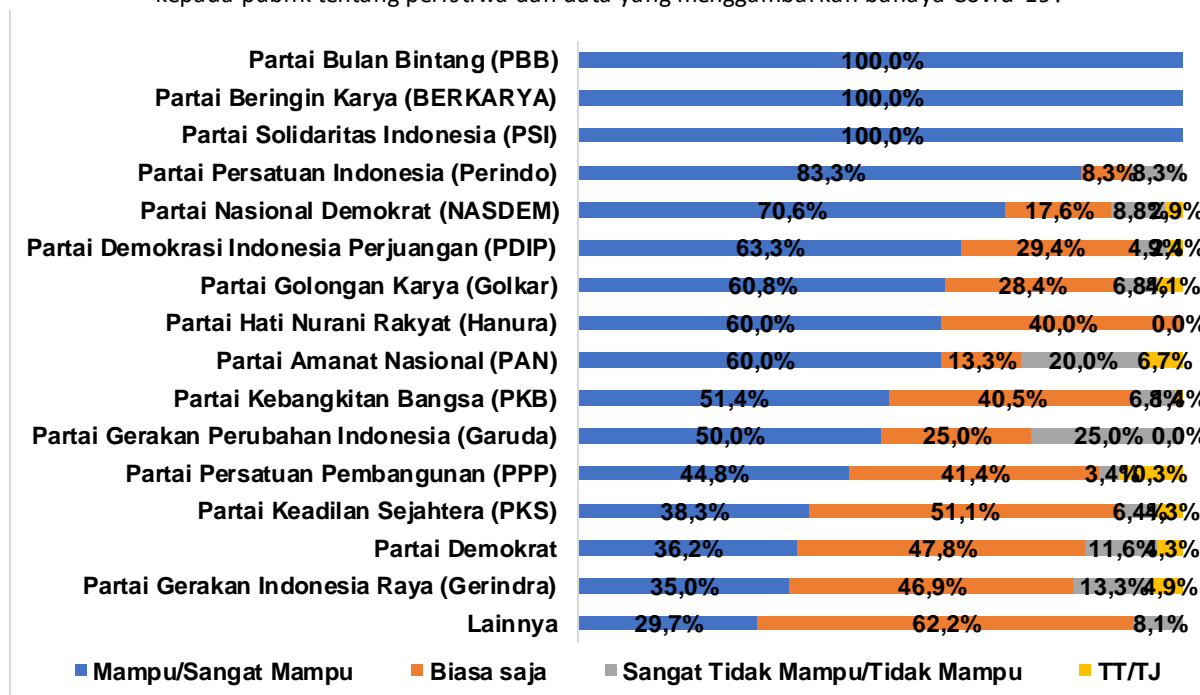
Bagan 1 Bagaimana Ibu / Bapak menilai kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mendeteksi dan mengantisipasi ancaman bahaya persebaran virus Covid-19 sejak wabah ini muncul di negara kita? Apakah sangat mampu, mampu, biasa saja, tidak mampu atau sangat tidak mampu?



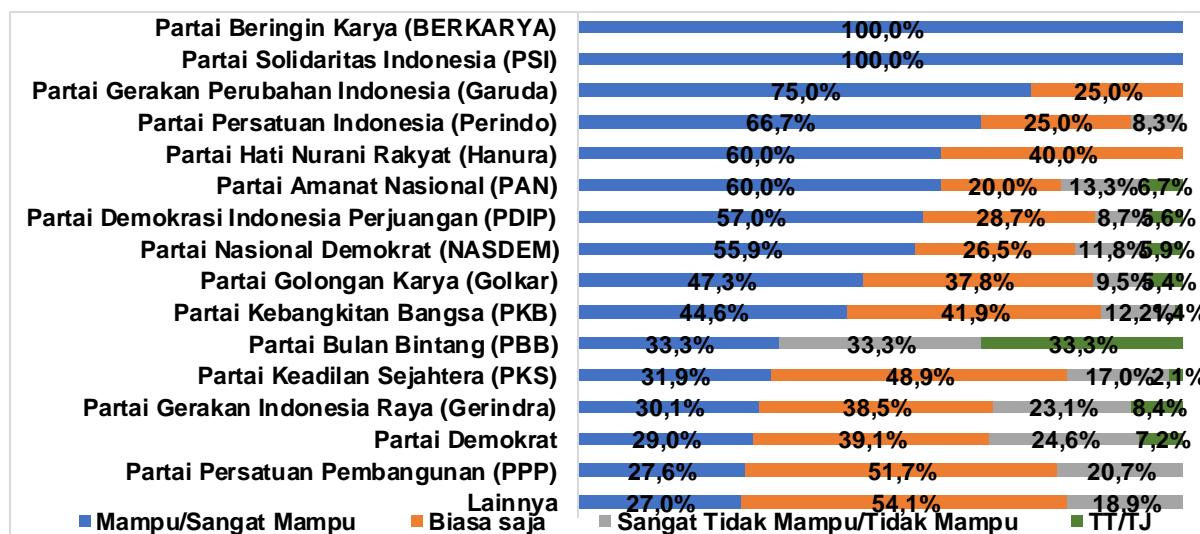
Kedua, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam memberikan penjelasan kepada publik tentang peristiwa dan data yang menggambarkan bahaya Covid-19. Hasil analisis statistik cross tabulasi menunjukkan mayoritas pemilih partai PKB, PAN, Partai Hanura, Golkar, PDIP, Partai Nasdem dan Perindo menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan semacam itu. Bahkan mereka yang mengaku sebagai pemilih partai PSI, BERKARYA dan PBB semuanya menilai dia memiliki kemampuan tersebut. Namun pemilih PPP, PKS, Partai Demokrat dan Gerindra yang menilai dia memiliki kemampuan semacam itu jumlahnya kurang dari 50 %. Dari jumlah pemilih partai tersebut yang menilai dia memiliki kemampuan tersebut adalah pemilih partai Gerindra (35 %), disusul dengan pemilih partai Demokrat (36,2 %), PKS (38,3 %) dan PPP (38,3 %). Lebih lanjut terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam bagan 2.

Ketiga, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan publik yang terkait dengan agenda pemulihan ekonomi nasional sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. Hasil analisis statistik cross tabulasi menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Partai Nasdem, PDIP, PAN, Hanura, Perindo dan Garuda menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Mereka yang mengaku pemilih Partai PSI dan Berkarya bahkan semuanya menilai bahwa dia memiliki kemampuan semacam itu. Sebaliknya, kurang dari 50 % pemilih partai Golkar, PKB, PBB, PKS, Gerindra, Demokrat dan PPP yang menilai dia memiliki kemampuan tersebut. Dari pemilih partai-partai tersebut, jumlah pemilih partai tersebut yang paling kecil menilai presiden memiliki kemampuan tersebut adalah PPP (27,6 %), disusul kemudian Partai Demokrat (29 %), Gerindra (30,1 %), PKS (31,9 %), PBB (33,3 %), PKB (44,6 %) dan Golkar (47,3 %). Jumlah terbesar dari pemilih partai-partai tersebut yang menilai dia tidak memiliki kemampuan tersebut adalah pemilih Partai Demokrat (24,6 %) dan Partai Gerindra (23,1%). Lebih lanjut terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam bagan 3.

Bagan 2 Bagaimana Ibu / Bapak menilai kemampuan Presiden Joko Widodo dalam memberikan penjelasan kepada publik tentang peristiwa dan data yang menggambarkan bahaya Covid-19?

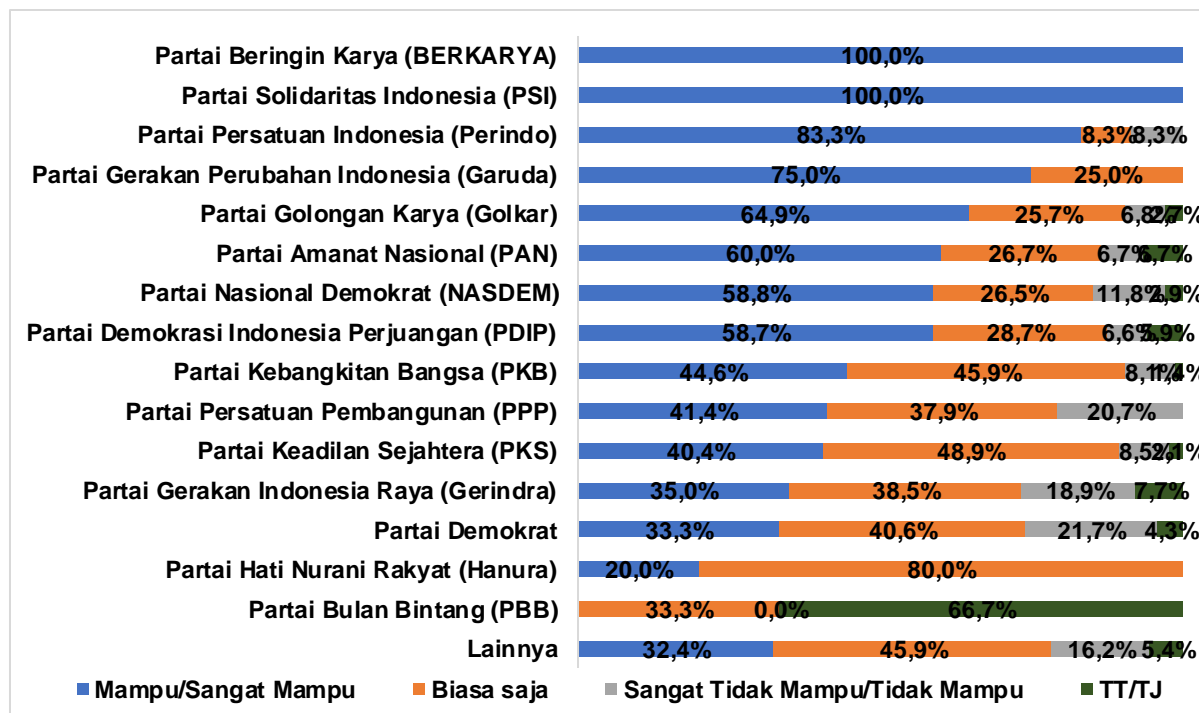


Bagan 3 Bagaimana Ibu / Bapak menilai kemampuan Presiden Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan publik yang terkait dengan agenda pemulihan ekonomi nasional sejak Pandemi Covid-19 berkembang di negara kita?



Keempat, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan publik yang terkait dengan penanganan krisis kesehatan publik/masyarakat sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. Hasil analisis statistik cross tabulasi menunjukkan bahwa mayoritas pemilih PDIP, PAN, Golkar, Garuda dan Perindo menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Mereka yang mengaku pemilih Partai PSI dan Berkarya bahkan semuanya menilai bahwa dia memiliki kemampuan semacam itu. Sebaliknya, kurang dari 50% pemilih PKB, PPP, PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Hanura yang menilai dia memiliki kemampuan tersebut. Dari pemilih partai-partai tersebut, 21,7% pemilih Partai Demokrat menilai dia tidak memiliki kemampuan semacam itu. Hal yang serupa juga terjadi pada pemilih PPP, dimana 20,7% dari pemilihnya skeptis akan kemampuan Presiden Joko Widodo terkait dengan hal tersebut dan juga pemilih Partai Gerindra, dimana 18,9% dari mereka juga memberikan penilaian yang serupa. Lebih lanjut terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam bagan 4.

Bagan 4 Bagaimana Ibu/Bapak menilai kemampuan Presiden Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan publik yang terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan publik/masyarakat sejak Pandemi Covid-19 berkembang di negara kita?

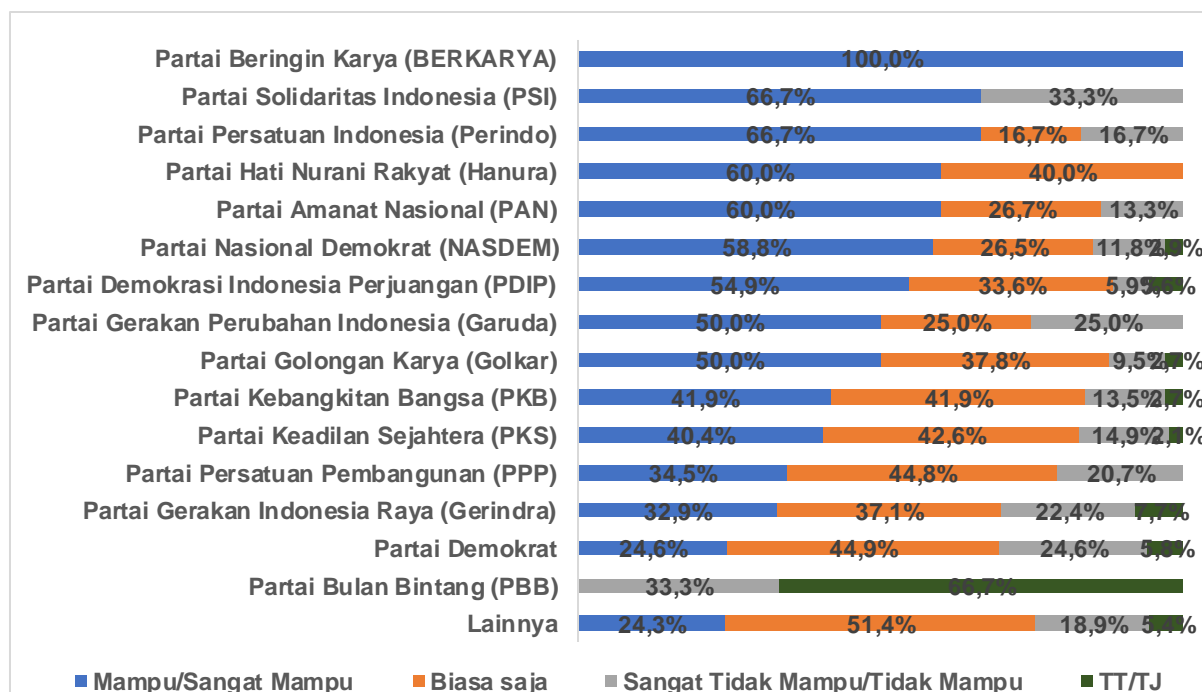


Kelima, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mengevaluasi kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan agenda pemulihan ekonomi nasional sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. Hasil analisis statistik cross tabulasi menunjukkan bahwa mayoritas pemilih partai Golkar, Garuda, PDIP, Nasdem, PAN, Hanura, Perindo dan PSI menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Hanya partai BERKARYA yang semua pemilihnya menilai dia memiliki kemampuan semacam itu. Sebaliknya, kurang dari 50 % pemilih partai PKB, PKS, PPP, Gerindra dan Demokrat yang menilai dia memiliki kemampuan tersebut. Dari pemilih partai-partai tersebut, jumlah pemilih Partai Demokrat yang menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan semacam itu adalah yang terkecil, yaitu 24,6 %. Berbeda dengan pemilih partai ini, jumlah pemilih Partai Gerindra dan PPP yang menilai dia memiliki kemampuan tersebut sedikit lebih besar, yaitu masing-masing sebesar 32,9 % dan 34,5 %. Yang menarik, jumlah pemilih PKS, yang menilai bahwa dia memiliki kemampuan tersebut lebih besar dari pemilih ketiga partai tersebut yaitu sebesar 40,4 %, meski partai ini merupakan partai oposisi/di luar pemerintahan. Lebih lanjut terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam bagan 5.

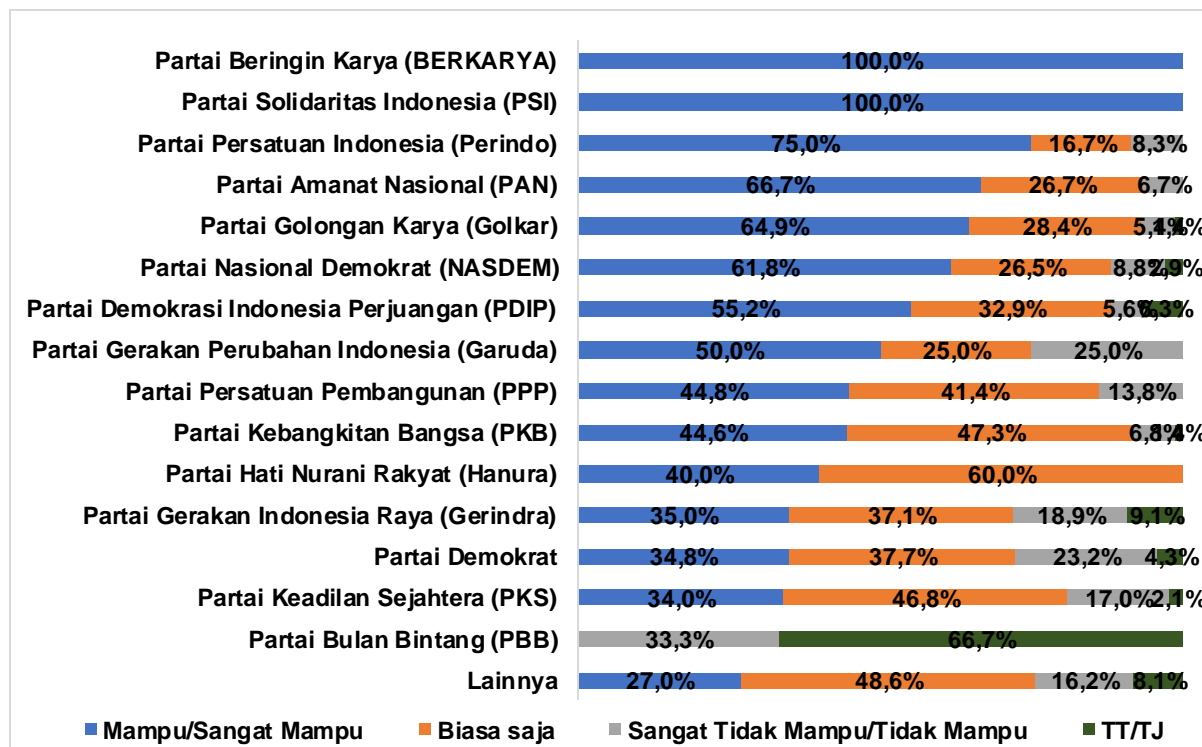
Keenam, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mengevaluasi kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan publik/masyarakat sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. Hasil analisis statistik cross tabulasi menunjukkan bahwa 50 % dari pemilih partai Garuda dan mayoritas pemilih partai PDIP, Nasdem, Golkar, PAN dan Perindo menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Sebaliknya, kurang dari 50 % dari pemilih partai PPP, PKB, Hanura, Gerindra, Demokrat dan PKS yang menilai bahwa dia memiliki kemampuan semacam itu. Diantara partai-partai tersebut, partai Demokrat dan PKS merupakan dua partai yang memiliki jumlah pemilih yang paling kecil yang menilai bahwa dia memiliki kemampuan tersebut, masing-masing sebesar 34 % dan 34,8 %, disusul kemudian partai Gerindra yaitu sebesar 35 %. Ketiga partai ini juga memiliki jumlah pemilih yang menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan semacam itu, masing-masing sebesar 17 %, 23,2 % dan 18,9 %. Lebih lanjut terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam bagan 6. Hal yang menarik dari temuan ini adalah meski Partai Gerindra sudah bergabung menjadi partai yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun hal ini tampaknya tidak mempengaruhi orientasi pemilihnya dalam menilai kemampuan Presiden Joko Widodo terkait dengan hal tersebut.

Ketujuh, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menyempurnakan kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan agenda pemulihan ekonomi nasional sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. Hasil analisis statistik cross tabulasi menunjukkan bahwa 50 % dari pemilih partai Garuda dan mayoritas pemilih partai PDIP, Nasdem, Golkar, PAN, Hanura, PSI dan Perindo menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan semacam itu. Namun, kurang dari 50 % dari pemilih PKB, PPP, PKS, Partai Demokrat dan Gerindra menilai bahwa dia memiliki kemampuan tersebut. Dari pemilih partai-partai tersebut, jumlah pemilih partai Gerindra yang memberikan penilaian semacam itu adalah yang terkecil, yaitu sebesar 28,7 %, disusul kemudian pemilih Partai Demokrat dan PKS, masing-masing sebesar 31,9 % dan 34 %. Hal yang menarik dalam temuan penelitian ini, sebagaimana yang dapat dilihat dalam bagan 7, adalah jumlah pemilih partai Gerindra yang menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan tersebut adalah yang paling banyak, yaitu 26,6 %, disusul kemudian pemilih Partai Demokrat dan PKS, masing-masing sebesar 24,6% dan 14,9 %. Hal ini mengindikasikan bahwa meski Partai Gerindra sudah bergabung menjadi partai yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun tidak mampu mempengaruhi orientasi pemilihnya dalam menilai kemampuan Presiden Joko Widodo terkait dengan hal tersebut.

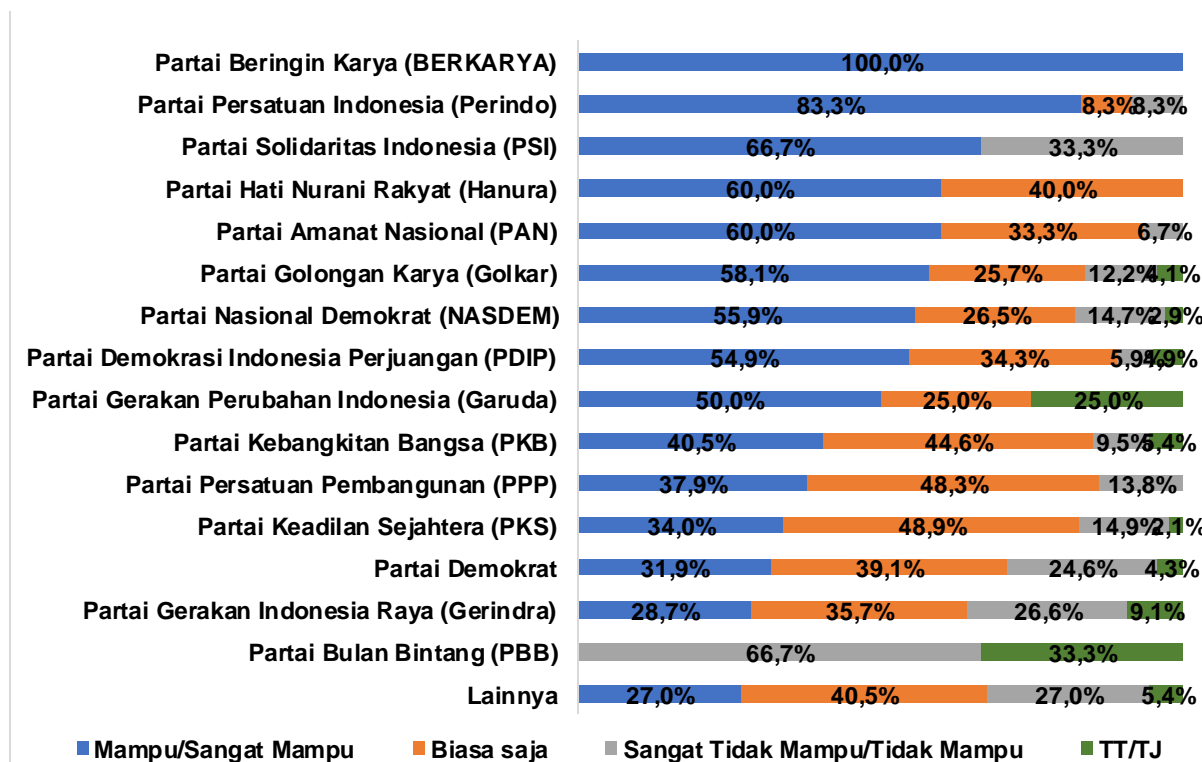
Bagan 5 Bagaimana Ibu / Bapak menilai kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mengevaluasi kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan agenda pemulihan ekonomi nasional sejak Pandemi Covid-19 berkembang di negara kita?



Bagan 6 Bagaimana Ibu / Bapak menilai kemampuan Presiden Joko Widodo dalam mengevaluasi kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan publik/masyarakat sejak Pandemi Covid-19 berkembang di negara kita?

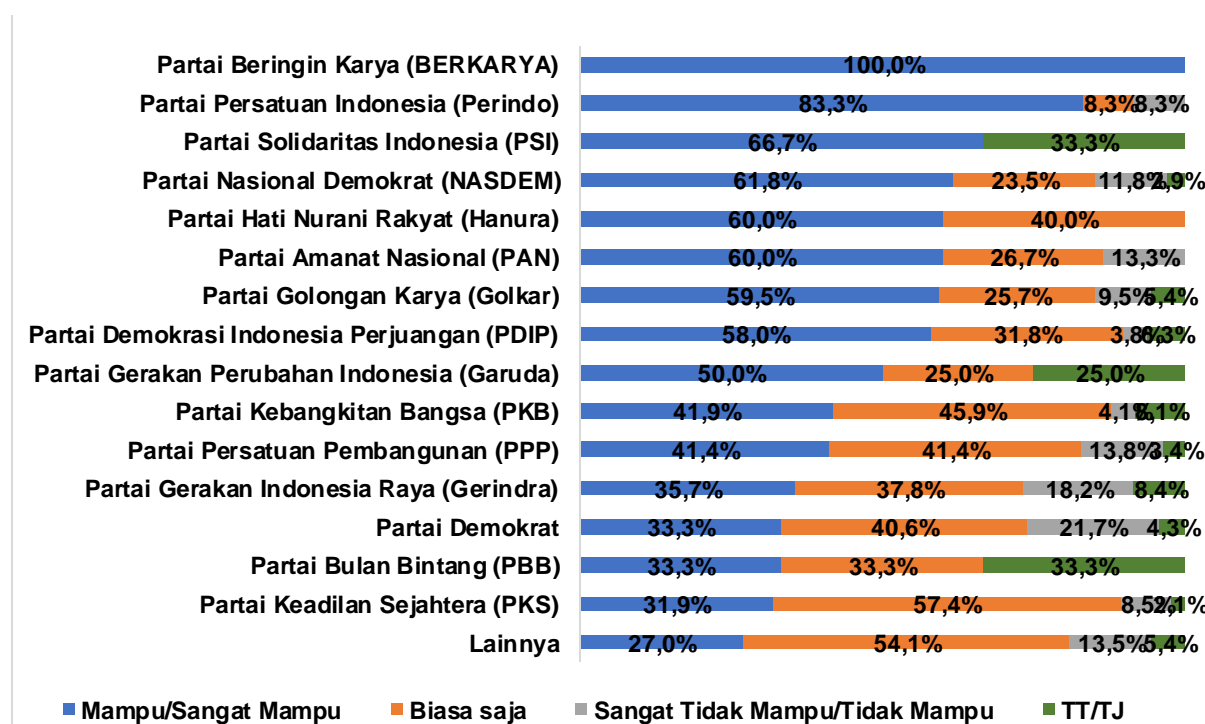


Bagan 7 Bagaimana Ibu / Bapak menilai kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menyempurnakan kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan agenda pemulihan ekonomi nasional sejak Pandemi Covid-19 berkembang di negara kita?



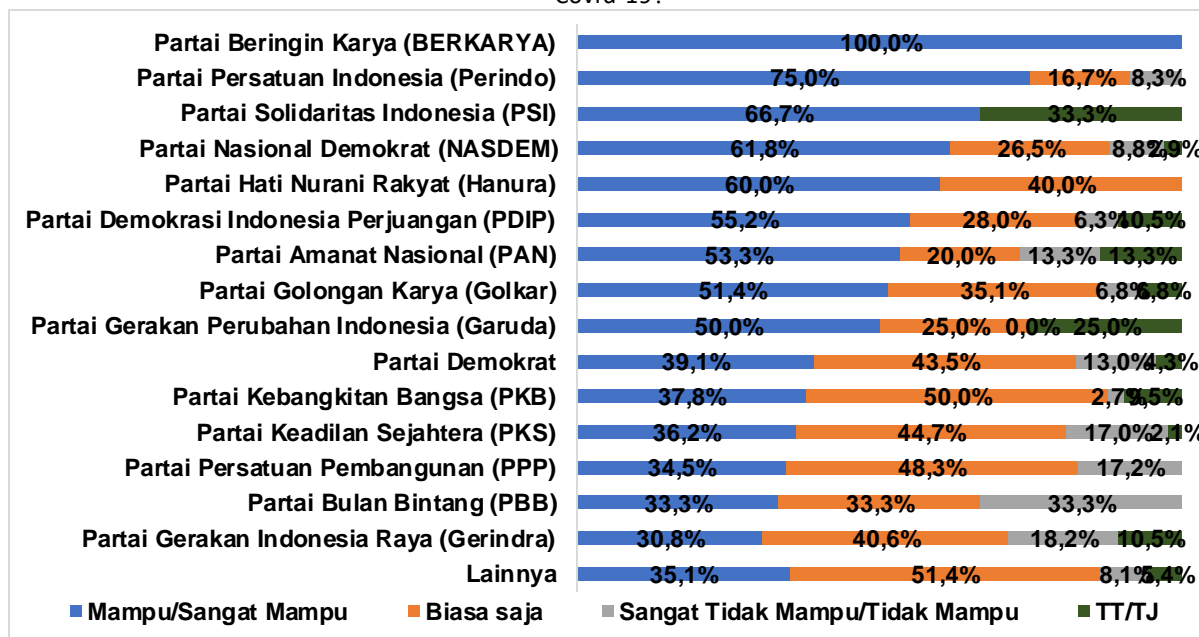
Kedelapan, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menyempurnakan kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan publik/masyarakat sejak Pandemi Covid-19 berkembang di Indonesia. Hasil analisis statistik cross tabulasi juga menunjukkan bahwa 50 % dari pemilih partai Garuda dan mayoritas pemilih partai PDIP, Golkar, PAN, Hanura, Nasdem, PSI dan Perindo menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Berbeda dengan pemilih partai-partai tersebut, kurang dari 50 % pemilih PKB, PPP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PBB dan PKS menilai bahwa dia memiliki kemampuan semacam itu. Dari pemilih partai-partai tersebut, jumlah pemilih partai yang menilai bahwa dia tidak memiliki kemampuan tersebut yang terbesar adalah pemilih Partai Demokrat, yaitu sebesar 21,7%, di susul dengan pemilih Partai Gerindra (18,2 %) dan PKS (13,8 %). Lebih lanjut terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam bagan 8. Hampir sama dengan pada poin sebelumnya, temuan ini juga menarik karena mempertegas adanya bias preferensi partai politik dalam penilaian publik atas kemampuan Presiden Joko Widodo terkait dengan hal tersebut di atas. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa meskipun Partai Gerindra sudah bergabung menjadi partai yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun hal ini tidak secara otomatis mampu mempengaruhi orientasi pemilihnya dalam menilai kemampuan Presiden Joko Widodo terkait dengan hal tersebut.

Bagan 8 Bagaimana Ibu / Bapak menilai kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menyempurnakan kelemahan kebijakan publik yang terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan publik/masyarakat sejak Pandemi Covid-19 berkembang di negara kita?

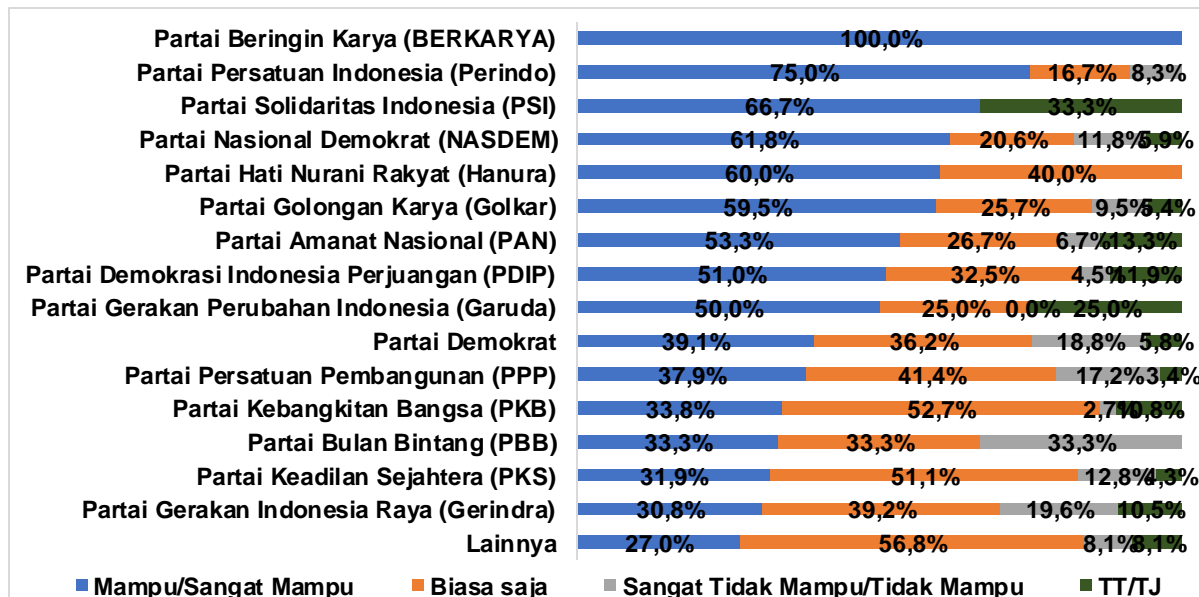


Kesembilan, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya internal yang dimiliki oleh Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk membangkitkan kembali perekonomian/tingkat pendapatan/tingkat daya beli masyarakat di tengah wabah Covid-19. Hasil analisis statistik cross tabulasi juga menunjukkan bahwa 50 % dari pemilih partai Garuda dan mayoritas pemilih partai Golkar, PAN, PDIP, Hanura, Nasdem, PSI dan Perindo menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan semacam itu. Sebaliknya, kurang dari 50 % dari pemilih Partai Demokrat, PKB, PKS, PPP, PBB, PPP dan Gerindra yang menilai bahwa dia memiliki kemampuan tersebut. Hal yang menarik dari temuan ini adalah, tidak hanya pemilih partai-partai oposisi saja, seperti PKS dan Partai Demokrat yang pemilihnya kurang dari 50 % memberikan model penilaian seperti ini, namun juga pemilih partai-partai PKB, PPP dan Gerindra yang sudah menjadi pendukung pemerintahan Jokowi juga menunjukkan trend yang sama. Bahkan jumlah pemilih Partai Gerindra yang menilai bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti di atas lebih besar dari jumlah pemilih PKS yang memberikan penilaian serupa yaitu sebesar 18,2 %. Lebih lanjut terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam bagan 9.

Bagan 9 Bagaimana Ibu / Bapak menilai kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya internal yang dimiliki oleh Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk membangkitkan kembali perekonomian/tingkat pendapatan/tingkat daya beli masyarakat di tengah wabah Covid-19?



Bagan 10 Bagaimana Ibu / Bapak menilai kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya eksternal di luar Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk membangkitkan kembali perekonomian/tingkat pendapatan/tingkat daya beli masyarakat di tengah wabah Covid-19?

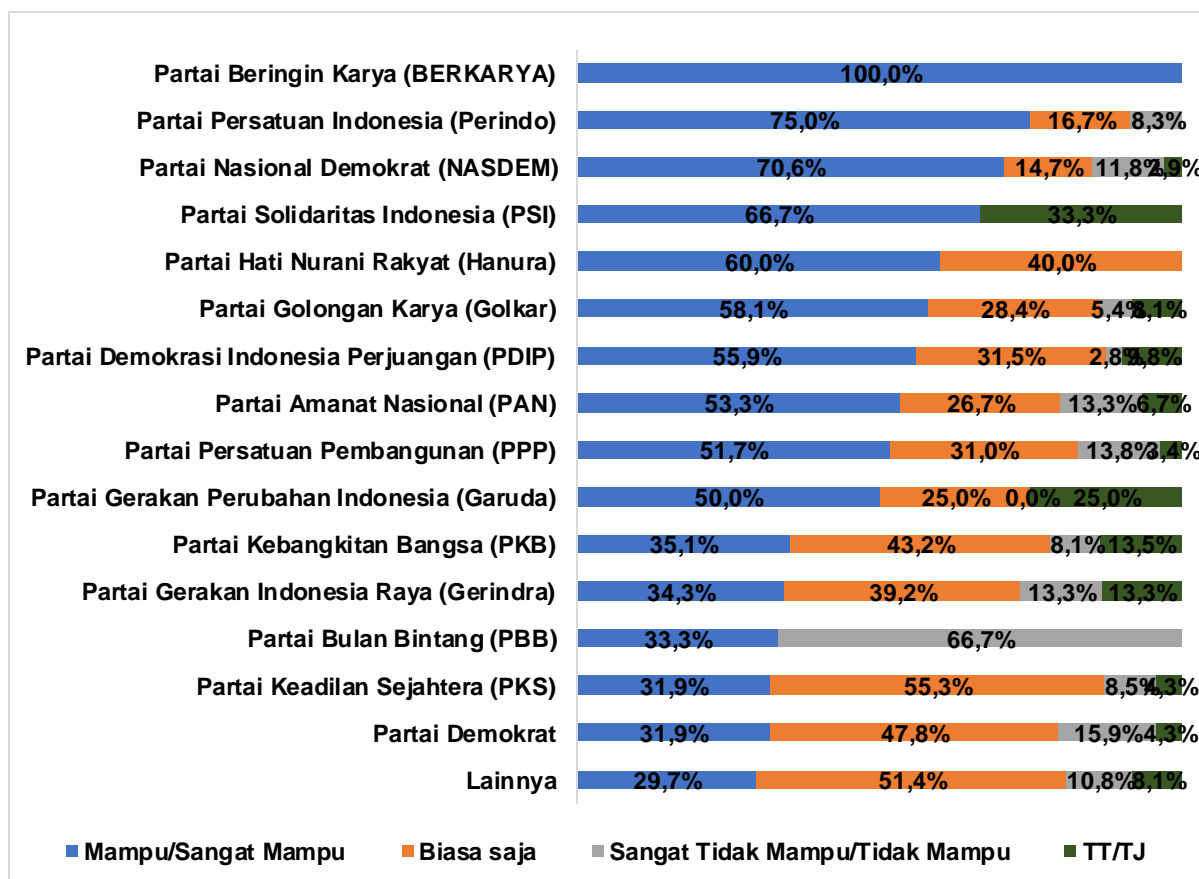


Kesepuluh, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya eksternal di luar Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk membangkitkan kembali perekonomian/tingkat pendapatan/tingkat daya beli masyarakat di tengah wabah Covid-19. Hasil analisis statistik cross tabulasi juga menunjukkan bahwa 50 % dari pemilih partai PDIP, PAN, Golkar, Hanura, Nasdem, PSI dan Perindo menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Sebaliknya, kurang dari 40 % dari pemilih Partai Demokrat, PPP, PKB, PBB, PKS dan Gerindra menilai bahwa dia memiliki kemampuan semacam itu. Hal yang menarik dari temuan analisis statistik cross tabulasi ini adalah dari jumlah pemilih partai-partai tersebut yang memberikan penilaian seperti ini yang jumlahnya terkecil adalah Partai Gerindra (30,8 %) dan yang terbesar adalah Partai Demokrat (39,1 %). Sedikit di atas jumlah pemilih Partai Gerindra tersebut, jumlah pemilih PKS

yang memberikan penilaian serupa sebesar 31,9 %, sebagaimana dapat dilihat dalam bagan 10. Ini menunjukkan bahwa, tidak hanya pemilih partai-partai oposisi seperti PKS dan Partai Demokrat saja, total pemilih Gerindra dan PPP juga menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan di atas masih cukup kecil yaitu di bawah 40 %.

Kesebelas, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya internal yang dimiliki oleh Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk memperkuat kembali tingkat kesehatan publik/masyarakat di tengah wabah Covid-19. Hasil analisis statistik cross tabulasi juga menunjukkan bahwa 50 % dari pemilih partai Garuda dan mayoritas pemilih PPP, PAN, PDIP, Golkar, Hanura, PSI, Nasdem dan Perindo menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Sebaliknya, kurang dari 40 % pemilih PKB, Gerindra, PBB, PKS dan Partai Demokrat menilai bahwa dia memiliki kemampuan semacam itu. Jumlah pemilih dari dua partai oposisi, yaitu PKS dan Demokrat, yang memiliki penilaian seperti itu jumlahnya lebih kecil dibandingkan jumlah pemilih partai PKB dan Gerindra yang memiliki kecenderungan penilaian seperti itu. Namun, jika dilihat dari total jumlah pemilih yang menilai bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti di atas, Partai Gerindra memiliki 13,3 % pemilih yang memiliki arah penilaian seperti ini. Angka tersebut, sebagaimana dapat dilihat dalam bagan 11, masih di bawah jumlah pemilih Partai Demokrat yang memiliki kecenderungan penilaian serupa (15,9 %), namun lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pemilih PKS yang menilai dengan cara serupa (8,5 %).

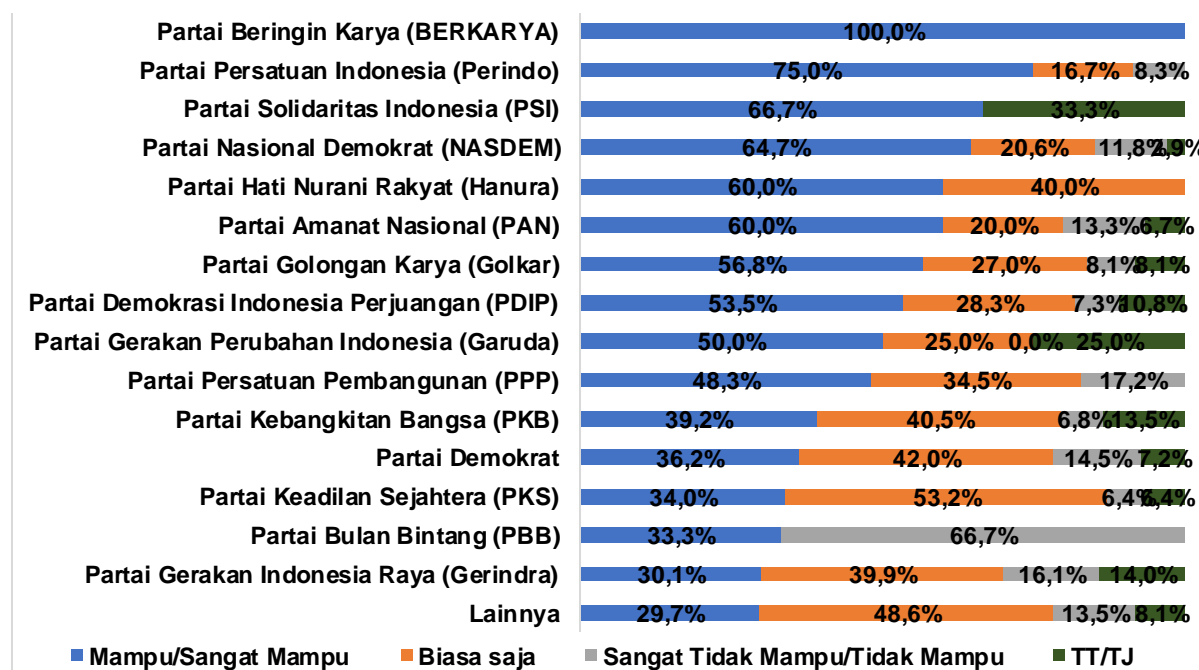
Bagan 11 Bagaimana Ibu/Bapak menilai kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya internal yang dimiliki oleh Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk memperkuat kembali tingkat kesehatan publik/masyarakat di tengah wabah Covid-19?



Keduabelas, kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya eksternal di luar Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk memperkuat kembali tingkat kesehatan publik/masyarakat di tengah wabah Covid-19. Hasil analisis statistik cross tabulasi juga menunjukkan bahwa 50 % dari pemilih partai Garuda dan mayoritas pemilih PDIP, Golkar, PAN, Hanura, Nasdem, PSI dan Perindo menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut. Sebaliknya, kurang dari 50 % dari pemilih PPP, PKB, Partai Demokrat, PKS, PBB dan Partai Gerindra menilai bahwa dia memiliki kemampuan semacam itu. Sebagaimana yang tampak dari bagan 12, tidak hanya dua partai oposisi (PKS dan Partai Demokrat) yang

memiliki pemilih dengan kecenderungan semacam itu, tiga parpol yang menjadi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu PPP, PKB dan Gerindra juga memiliki kecenderungan yang sama. Bahkan Di antara parpol-parpol tersebut, Gerindra merupakan parpol yang memiliki jumlah pemilih yang terkecil yang menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan tersebut.

Bagan 12 Bagaimana Ibu/Bapak menilai kemampuan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan sumber daya eksternal di luar Lembaga Negara/Pemerintahan yang dipimpinnya untuk memperkuat kembali tingkat kesehatan publik/masyarakat di tengah wabah Covid-19?



Data hasil analisis data survei dengan statistik cross tabulasi, sebagaimana yang disajikan dalam bagan 1-12 di atas, dapat disimpulkan tiga temuan berikut. Pertama, hasil analisis statistik cross tabulasi secara umum menunjukkan bahwa mayoritas pemilih yang memilih PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PAN dalam Pemilu Legislatif 2019 lalu tampak cenderung menilai Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan dalam mengatasi wabah pandemi covid-19. PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PAN merupakan parpol yang memiliki jumlah pemilih dengan lebih dari 50 % yang mengapresiasi kemampuan Presiden Joko Widodo terkait dengan dengan dua belas hal di atas. Sebaliknya, jumlah pemilih PKB, PPP, Gerindra, Partai Demokrat dan PKS tampak cenderung yang menilai bahwa Presiden Joko Widodo terkait dengan kedua belas hal di atas kurang dari 50 %. Dari parpol-parpol tersebut, tidak hanya PKS dan Partai Demokrasi saja, Gerindra juga memiliki jumlah pemilih dengan jumlah yang terbatas yang memiliki kecenderungan seperti itu. Meski demikian, hanya sedikit diantara pemilih parpol-parpol tersebut, termasuk pemilih Partai Gerindra yang menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan seperti itu.

Kedua, dalam Pilpres 2019 lalu, PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan PPP merupakan koalisi parpol yang mengusung pasangan Joko Widodo-Ma'rif Amin. Sementara itu, Gerindra, PKS dan Partai Demokrat merupakan anggota koalisi parpol yang menjadi pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Dalam perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, PAN dan Gerindra menjadi pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sedangkan, PKS dan Partai Demokrat konsisten di luar Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meski kedua partai tersebut sudah bergabung dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak serta merta mayoritas pemilih partai tersebut menilai secara positif atas kemampuan Presiden Joko Widodo terkait dengan kedua belas hal di atas. Hal ini menunjukkan adanya bias persepsi publik terkait dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam menangani wabah pandemi covid 19 masih ada di kalangan masyarakat di Indonesia. Bias tersebut ditentukan oleh perbedaan preferensi politik mereka pada parpol yang mereka pilih dalam pemilu legislative 2019.

Diskusi Penelitian

Kemampuan kepemimpinan seorang presiden dan ragam kebijakan yang dilakukannya dalam mengelola kekuasaan Negara/Pemerintahan merupakan salah satu isu penting dalam kajian kepresidenan (*presidential studies*). Kajian ini selama beberapa dasawarsa terakhir terus berkembang di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan presidentiasial. Dari kecenderungan kajian yang ada, sejumlah kajian diarahkan untuk mengkaji akuntabilitas kinerja presiden (Morris, 1986; Rockhman, 1986), performance kinerja presiden (Shaw, 1998; Gilbert, 2006) dan model-model kepemimpinan presiden (Burnam, 2010). Beberapa kajian lainnya juga diarahkan untuk meneliti proses inisiasi dan pembuatan kebijakan publik presiden (Ponder, 1996; Steger, 1997) dan tingkat dukungan publik dan elit terhadap presiden (Edwards III, 1997; Lebo, 2008; Cohen, 2013). Meski demikian, tidak banyak kajian yang secara khusus ditujukan untuk mengevaluasi seperti apa ragam persepsi publik terkait dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden dalam menghadapi wabah global, khususnya pandemi covid 19 dan faktor-faktor potensial apa saja yang bisa menentukan persepsi tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan di atas merupakan sebuah upaya untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, khususnya dalam konteks Indonesia. Berdasarkan data survei yang diolah dengan analisis statistik deskriptif dan cross tabulasi, penulis menemukan bahwa persepsi publik terkait dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 sejak penerapan kebijakan New Normal tampak beragam. Sebagian publik menyatakan puas/sangat puas dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 sejak penerapan kebijakan New Normal. Sebagian menjawab biasa saja, dan hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak puas/sangat tidak puas dan tidak memberikan jawaban/mengaku tidak tahu. Kendati demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemilih atau publik menyatakan bahwa mereka mengaku puas/sangat puas dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 sejak penerapan kebijakan New Normal. Melalui analisis statistik dan cross tabulasi, penelitian ini juga menemukan adanya bahwa preferensi politik publik pada parpol yang dipilihnya dalam Pemilu Legislatif 2019 lalu juga menjadi salah satu faktor potensial yang dapat mempengaruhi persepsi publik terkait dengan hal tersebut. Bias persepsi ini tampak sekali menonjol khususnya di kalangan pemilih dua partai yang berada di luar Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu PKS dan Partai Demokrat, pemilih partai pendukung pasangan Capres-Cawapres yang pernah menjadi lawan pasangan Jokowi-Makruf Amin, yaitu Gerindra dan juga para pemilih di tiga partai yang pernah mengukung pasangan Capres-Cawapres ini, yaitu PPP dan PKB. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pemilih partai-partai tersebut masih belum sepenuhnya puas dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi covid-19.

Penulis berpendapat bahwa hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kajian kepresidenan, khususnya dalam konteks Indonesia. Sebagaimana banyak dibahas dalam literature kajian kepresidenan, kajian ini pada mulanya dipromosikan oleh Neustadt (1960, 1976) dengan fokus pada seperti apa kekuasaan yang dimiliki seorang presiden dan bagaimana seorang presiden bisa memiliki dan menggunakan kekuasaannya dalam mengelola pemerintahan. Kajian ini kemudian terus berkembang dengan mengkaji tidak hanya model kepemimpinan presiden semata, namun juga ragam kemampuan yang (perlu) dimiliki presiden dalam pengelolaan kekuasaan Pemerintahan (Thomas, 1977; Tenpas dan Dickinson, 1997; Bowles, 1999). Dalam pengelolaan kekuasaan Pemerintahan, otoritas kekuasaan yang dimiliki seorang presiden semata tentu tidak cukup. Sebagaimana pemimpin dalam organisasi-organisasi lainnya, seorang presiden juga memerlukan kapasitas personal (*personal competence*) yang memadai. Di sini, pemikiran Richard Bolden dan Jonathan Gosling (2006), Sateesh V. Shet, S.V Patil dan Meena R. Chandawarkar, (2017) dan Davidson et al (2012) tentang konsep kapasitas personal (*personal competence*) menjadi sangat relevan. Kapasitas semacam ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang presiden khususnya di masa krisis atau dalam menghadapi sebuah krisis, termasuk krisis kesehatan dan ekonomi yang diakibatkan oleh wabah pandemi covid-19. Dalam situasi krisis semacam itu, seorang presiden yang memiliki kapasitas personal semata seringkali juga belum dianggap memadai. Sebagai seorang pemimpin utama dalam sistem pemerintahan presidential, dia perlu memiliki ketangguhan dalam kepemimpinan (*resilience leadership*). Dalam konteks yang seperti ini, maka konsep ketangguhan kepemimpinan (*resilience leadership*) sebagaimana yang disampaikan oleh Kawasi Dartey-Baah (2015) dan Ledesma (2014) menjadi sangat penting dan relevan. Kapasitas personal dan ketangguhan kepemimpinan tersebut tidak hanya dapat disaksikan, namun juga dapat dinilai oleh publik/pemilih secara terus menerus melalui beragam media massa dan media sosial. Melalui media-media tersebut, mereka dapat menyimak apa saja tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh seorang presiden dalam memimpin para pembantu (Menterinya) untuk mengatasi situasi krisis, termasuk selama pandemi covid-19. Tentu ada beragam faktor yang dapat menentukan penilaian publik/pemilih terhadap kapasitas personal dan ketangguhan kepemimpinan seorang presiden ketika pandemi berlangsung. Salah satu faktor yang potensial menentukan penilaian tersebut adalah preferensi politik

pemilih/publik pada partai politik. Dalam konteks ini, konsep konsep preferensi politik yang dikemukakan oleh Johnson (1964), Folke dan Rickne (2020) dan Muller dan Renes (2021) menjadi relevan.

Berdasarkan proposisi di atas, penulis berpendapat bahwa konsep kapasitas personal (*personal competence*), ketangguhan kepemimpinan (*resilience leadership*) dan preferensi politik yang digunakan oleh para ahli di atas penting untuk diadaptasi dan dikembangkan dalam menilai kinerja dan kepemimpinan seorang presiden. Meski demikian, penelitian lebih lanjut juga masih diperlukan untuk mengembangkan dua hal berikut. *Pertama*, sebuah model teoritik mengenai persepsi publik tentang kepemimpinan seorang presiden khususnya di masa krisis, seperti covid 19 saat ini, di mana di dalamnya mencakup dampak persepsi publik mengenai kapasitas personal dan ketangguhan kepemimpinan seorang presiden terhadap tingkat dukungan publik pada seorang presiden dan juga para pembantu (Menteri) nya ketika mereka menangani krisis tersebut. *Kedua*, sebuah model teoritik mengenai persepsi publik tentang kepemimpinan seorang presiden yang di dalamnya juga mencakup faktor-faktor apa saja yang potensial mempengaruhi persepsi publik mengenai kapasitas personal dan ketangguhan kepemimpinan seorang presiden dalam penanganan krisis tersebut dan juga tingkat dukungan publik pada seorang presiden dan juga para pembantu (Menteri) nya ketika mereka menangani krisis tersebut. Eksplorasi lebih lanjut penting dilakukan tidak hanya terkait dengan faktor-faktor kelas social/tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, preferensi politik pada sosok Capres yang potensial maju dalam Pilpres 2024 dan juga jenis akses media, namun juga terkait dengan faktor-faktor sosiodemografis apa saja, seperti usia, jenis pekerjaan, kategori tempat tinggal (desa-kota) dan gender, yang bisa menjadi faktor determinan dalam menentukan persepsi publik.

Eksplorasi atas faktor-faktor di atas dapat digunakan untuk pengembangan model teoritik yang menggambarkan kapasitas personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden di masa krisis, khususnya di masa pandemi seperti saat ini. Upaya ini juga dapat menjadi titik pijak untuk mengembangkan model teoritik eksplanatif yang dapat menjelaskan faktor-faktor potensial mana saja yang dapat atau nantinya paling menentukan persepsi publik atas kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan untuk menangani penanggulangan wabah covid 19. Model teoritik eksplanatif ini nantinya juga sangat mungkin dikembangkan lagi sebagai model praktis manajerial untuk memberikan masukan bagi presiden dan lembaga kepresidenan, dan para Menteri pembantu presiden serta kalangan profesional yang bekerja di lingkaran presiden dan kementerian agar lebih tangguh dalam mengawal penguatan kapasitas personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden dalam mengatasi wabah covid 19 tersebut.

KESIMPULAN

Artikel ini dimaksudkan untuk mengevaluasi seperti apa persepsi publik di Indonesia terkait dengan kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah covid 19 tersebut sejak penerapan kebijakan New Normal dan sejauh mana preferensi politik publik pada parpol dipilihnya dalam Pemilu Legislatif 2019 lalu menjadi salah satu faktor potensial yang dapat menentukan persepsi publik tersebut. Untuk mengkaji hal tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep kepemimpinan presiden (*presidential leadership*), kapasitas personal (*personal competence*), ketangguhan kepemimpinan (*resilient leadership*) dan preferensi politik (*political preference*) dan dengan mengadaptasi paradigma positivist untuk menggumpulkan data penelitian yang berbasis metode survei. Survei nasional dilakukan pada bulan April 2021 dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 1200 mewakili populasi masyarakat Indonesia yang ada di 34 Propinsi di Indonesia.

Dari data survei tersebut, hasil penelitian menemukan dua hal berikut. *Pertama*, persepsi publik atas kapasitas personal dan ketangguhan kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mengatasi wabah pandemic covid 19 pasca kebijakan New Normal secara umum cukup beragam. Namun jumlah publik/masyarakat yang menilai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kapasitas personal dan ketangguhan kepemimpinan dalam mengatasi wabah pandemi covid tersebut pasca penerapan kebijakan New Normal secara umum lebih dominan dibandingkan mereka yang menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki kapasitas personal dan ketangguhan kepemimpinan terkait dengan hal tersebut. *Kedua*, preferensi politik publik pada pilihan parpol dalam Pemilu Legislatif 2019 lalu menjadi salah satu faktor potensial yang dapat mempengaruhi persepsi publik terkait dengan hal tersebut.

Hasil penelitian berbasis ekstraksi data survei tersebut secara umum mengindikasikan adanya bias persepsi publik di Indonesia terkait dengan kemampuan personal dan resiliensi kepemimpinan seorang presiden dalam penanganan bencana, seperti wabah pandemi covid-19. Mayoritas pemilih PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PAN dalam Pemilu Legislatif 2019 lalu tampak cenderung menilai bahwa presiden Joko Widodo punya kemampuan personal dan ketangguhan kepemimpinan dalam mengatasi wabah pandemi covid-19. Hal ini

sebaliknya sangat berbeda dengan persepsi dari mayoritas pemilih Gerindra, Partai Demokrat dan PKS terkait dengan hal tersebut. Ini mengindikasikan bahwa bias persepsi publik menjadi salah satu faktor penting ketika publik menilai kemampuan personal dan resiliensi kepemimpinan seorang presiden dalam menanganikrisis atau bencana seperti di masa pandemi covid-19 tersebut. Bias persepsi publik tersebut salah satunya adalah disebabkan oleh perbedaan preferensi politik publik pada partai politik.

PENGAKUAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para reviewer yang telah memberikan masukan pada artikel ini. Penelitian ini didukung oleh Hibah Riset Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, FISIPOL UGM tahun 2021.

REFERENSI

- Ahmad, N. (2022a). Cara Cepat Menulis Tesis dan Disertasi yang Menarik & Berkualitas: Panduan Praktis-Reflektif Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis dan Kualitas Hasil Penelitian Tesis dan Disertasi dalam Ilmu Sosial, Politik dan Komunikasi. Yogyakarta: Nas Media Pustaka & Indonesia Persada Studi. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4YZmEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=JO56OG2isk&sig=EoDadgnp3RRuigZwCFgtTovPBCw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Ahmad, N. (2022b). The Four Faces of Authoritarian Populism and Their Consequences on Journalistic Freedom: A Lesson Learnt From Indonesia's 2019 Presidential Election. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 10(2), 189-201. doi:10.1017/trn.2021.16
- Ahmad, N. (2022c). Political markets, the party-related factors and political party's market-orientation in Indonesia's democracy: evidence from Indonesia's 2014 parliamentary election. *Quality & Quantity*, 56(1), 333-357. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01111-z>
- Ahmad, N. (2021a). Presidential Rhetoric in the COVID-19 Pandemi Era: Jokowi's Aristotelian Rhetorical Leadership Models Before and After Implementation of Semi-Lock Down Policy. *Jurnal Komunikasi ISKI*, 6(1): 72-85
- Ahmad, N. (2021b). Dasar-Dasar Komunikasi Publik. Yogyakarta: Nas Media Pustaka & Indonesia Persada Studi. <https://books.google.co.id/books?id=RvVZEAAAQBAJ&pg=PR3&lpg=PR3&dq=Nyarwi+ahmad+%2B+dasar-dasar+komunikasi+publik&source=bl&ots=vk-xUjKlgN&sig=ACfU3U0WYDxtjHRIS43gEgVYIC3sHxYA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKewjbrsPph8b1AhXSW3wKHVcLBbsQ6AF6BAgvEAM#v=onepage&q&f=false>
- Ahmad, N. (2020). Celebification of Politics: Understanding Migration of Celebrities into Politics Celebification of Celebrity Politicians in the Emerging Democracy of Indonesia. *East Asia*, 37(1): 63-79.
- Ahmad, N. (2017). Political Marketing Management of Parliament Under the Presidential Government System: A Lesson Learned from the Indonesia House of Representative Post-New Order Soeharto. *Journal of Political Marketing*, 16(2), 71-94
- Bardes, B.A., & Oldendick, Robert W. (2017). *Measuring the American Mind*. Maryland: Rowman & Littlefield. Fifth Edition
- Berinsky, A.J. (2017). Measuring Publik Opinion with Surveys. *Annual Review of Political Science*, 20, 309-329.
- Bolden, R., & Gosling, J. (2006). Leadership Competencies: Time to Change the Tune? *Leadership*, 2(2), 147-163.
- Bowles, N. (1999). Studying the Presidency. *Annual Review of Political Science*, 2, 1-23.
- Burnam, J. (2010). The President and the Environment: A Reinterpretation of Neustadt's Theory of Presidential Leadership. *Congress and the Presidency*, 37(3), 302-322.
- Dartley-Baah, K. (2015). Resilient leadership: a transformational-transactional leadership mix", *Journal of Global Responsibility*, 6(1), 99-112
- Duke, C. R., Pickett, G.M., Carlson, L., & Grove, S.J. (1993). A Method for Evaluating the Ethics of Fear Appeals, *Journal of Publik Policy & Marketing*, 12(1), 120-129
- Edwards III, G.C. (1997). Aligning Tests with Theory: Presidential Approval as a Source of Influence in Congress. *Congress and the Presidency*, 24(2), 113-130.
- Eisenhart, K. M. (1989). Building theories from case study research. *Academy of Management Review*, 14(4), 532-550.
- Eshbaugh-Soha, M. (2010). The Politics of Presidential Speeches. *Congress and the Presidency*, 37(1), 1-21.
- Eshbaugh-Soha, M., & Miles, T. (2011). Presidential Speeches and the Stages of the Legislative Process. *Congress and the Presidency*, 38(3), 301-321.
- Eshbaugh-Soha, M., & Peake, J. S. (2004). Presidential Influence Over the Systemic Agenda. *Congress and the Presidency*, 31(2), 181-201.

- Folke, O., & Rickne, J. (2020). Who wins preference votes? An analysis of party loyalty, ideology, and accountability to voters. *Journal of Theoretical Politics*, 32(1), 11–35
- Fried, A., & Cole, T. M. (2004). Presidential Impeachment and Institutional Dynamics in the Iran-Contra Affair and the Clinton-Lewinsky Scandal. *Congress and the Presidency*, 31(1), 77-98.
- Genovese, M.A., & Streb, M.J. (2004). *Polls and Politics: The Dilemmas of Democracy*. New York: State University of New York Press.
- Gilbert, R.E. (2006). Personal Tragedy and Presidential Performance: Calvin Coolidge as Legislative Leader. *Congress and the Presidency*, 33(2), 47-68.
- Hickel Jr, F. R. (2019). Building Alliances or Rallying the Base: Civil Religious Rhetoric and the Modern Presidency. *Congress and the Presidency*. DOI, 10.1080/07343469.2019.1569175
- Insead, R.L.H., & Green JR., S.E. (2016). A Rhetorical Model of Institutional Decision Making: The Roles of Rhetoric in the Formation and Change of Legitimacy Judgements, *Academy of Management Review*, 41(1), 130-150.
- Johnson, B. (1962). Ascetic Protestantism and Political Preference. *The Publik Opinion Quarterly*, 26(1), 35-46
- Keen, S. (2006). A Theory of Narrative Empathy. *Narrative*, 14(3), 207-236
- King, J.D., & Riddlesperger Jr., J.W. (1995). Unscheduled Presidential Transitions: Lessons from the Truman, Johnson, and Ford Administrations. *Congress and the Presidency*, 22(1), 1-17.
- Lebo, M.J. (2008). Divided Government, United Approval: The Dynamics of Congressional and Presidential Approval. *Congress and the Presidency*, 35(2), 1-16.
- Ledesma, J. (2014). Conceptual Frameworks and Research Models on Resilience in Leadership. *Sage Open*, 1-8. DOI: 10.1177/2158244014545464
- Muller, D., & Renes, S. (2021). Fairness views and political preferences: evidence from a large and heterogeneous sample. *Social Choice and Welfare*, 56, 671-711
- Morris, B. S. (1986). Presidential Accountability in Foreign Policy, Some Recurring Problems. *Congress and the Presidency*, 13(2), 157-176
- Neustadt, R.E. (1960). *Presidential Power: The Politics of Leadership*. New York: John Wiley & Sons.
- Neustadt, R.E. (1976). *Presidential Power with Reflections on Johnson and Nixon*. New York: John Wiley and Sons.
- Olds, C. (2013). Assessing Presidential Agenda-Setting Capacity, Dynamic Comparisons of Presidential, Mass Media, and Publik Attention to Economic Issues. *Congress and the Presidency*, 40(3), 255-284.
- Ponder, D.E. (1996). Three Strategies of Presidential Policy Making, Politics and Policy in the Carter Administration. *Congress and the Presidency*, 23(2), 113-137.
- Shaw, C. M. (1998). President Clinton's First Term: Matching Campaign Promises with Presidential Performance. *Congress and the Presidency*, 25(1), 43-65.
- Shet, Sateesh V., Patil, S.V., & Chandawarkar, Meena R. (2017) Framework for methodical review of literature on leadership competencies. *Cogent Business & Management*, 4 (1), 1-12. DOI: 10.1080/23311975.2017.1309123
- Suddaby, R., & Greenwood, R. (2005). Rhetorical Strategies of Legitimacy, *Administrative Science Quarterly*, 50(1), 35-67
- Tenpas, K.D., & Dickinson, M.J. (1997). Governing, Campaigning, and Organizing the Presidency, An Electoral Connection? *Political Science Quarterly*, 112(1), 51-66
- Teten, R.L (2007). "We the People": The "Modern" Rhetorical Popular Address of the Presidents during the Founding Period. *Political Research Quarterly*, 60(4): 669-682
- Thomas, N.C. (1977). Studying the Presidency: Where and How Do We Go from Here? *Presidential Studies Quarterly*, 7(4): 169-175
- Windt Jr, T.O. (1986). Presidential Rhetoric: Definition of a Field Study. *Presidential Studies Quarterly*, 16(1):102-116.